

LAMPIRAN 1
SURAT IJIN PENELITIAN UNIVERSITAS



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN

Nomor : B/23/2/IX/2018
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : Satu Lembar
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Wawancara dan Permintaan Data.

Bogor, 7 September 2018

Kepada
 Yth. Pejabat tersebut dalam lampiran di
 Tempat

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - b. Kalender Pendidikan Program Studi Damai Dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional Unhan TA. 2017/2018.
2. Sehubungan dasar diatas, dengan hormat disampaikan bahwa:
 - a. Sebagai syarat kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan bidang program studinya.
 - b. Mahasiswa Program Studi Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional Unhan atas nama Khoirul Hasan, NIM: 120170303015, Nomor HP: 085800424376, email: khoirul.hasan@kn.idu.ac.id, bermaksud menyusun tesis dengan judul: "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Potensi Konflik Horizontal Dengan Pemilik Tambang Batuan Kabupaten Bogor (Studi Kasus Gerakan Jalur Tambang Tahun 2017 – 2018)."
3. Mohon konfirmasi waktu dan pelaksanaan pengumpulan data tersebut. *Contact Person*: HP 085800424376 a.n Khoirul Hasan.
4. Demikian untuk menjadikan periksa dan terimakasih atas kerjasamanya.

a.n. Rektor
 Universitas Pertahanan
 Warel I Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,



Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M.Eng
 Pembina Utama IV/e

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Barat
2. Sekjen Kemhan
3. Rektor Unhan
4. Kapolda Jawa Barat
5. Dekan FKN Unhan
6. Karo AK Unhan
7. Walikota Bogor.

Kawasan IPSC Sentul Bogor. Telepon 021-29618766

SURAT IJIN PENELITIAN KESBANGPOL



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl.KSR. Dadi Kusmayadi Komplek Pemda Kel. Tengah Cibinong-Bogor 16914 Telp/Fax. (021) 8758836

Cibinong, 13 September 2018

Nomor : 070 / 1294 -Kesbangpol
 Lampiran : -
 Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Kepada
 Yth. 1. Kepala BAPPEDALITBANG
 2. Sekretaris DPRD
 3. Kepala Dinas Kesehatan
 4. Kepala Dinas PUPR
 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 6. Camat Parung Panjang
 di -

Tempat

Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Bupati Bogor Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Surat dari **Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan- Universitas Pertahanan** tanggal : **7 September 2018** nomor **B/2312/IX/2018** Perihal **Permohonan Izin Penelitian Wawancara dan Permintaan Data.**

Atas dasar tersebut di atas, dengan ini kami memberikan **Rekomendasi** dilaksanakannya kegiatan **Penelitian** yang dilakukan oleh:

Nama : Khoiril Hasan
 Alamat : Kedung Mutih Rt 003/ 003 Kel. Kedung Mutih Kec. Wedung
 Penanggung jawab : Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M, Eng
 Jumlah Peserta : 1 (satu) orang
 Judul Penelitian : Peran Pemerintah Daerah Dalam Menciptakan Resolusi Konflik Antara Aliansi Gerakan Jalur Tambang (AGJT) Dengan Pemilik Tambang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
 Waktu : 17 September s.d. 31 Desember 2018
 Tempat : BAPPEDALITBANG, Sekretariat DPRD, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, dan Kec. Parung Panjang Kabupaten Bogor

dengan ketentuan :

1. Mentaati seluruh ketentuan Peraturan Perundang-undangan / Peraturan Daerah yang berlaku di Kabupaten Bogor.
2. Tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan di luar ketentuan yang ditetapkan di atas.
3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan, agar **Mahasiswa/i** yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Bupati Bogor melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor.

Demikian, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Tembusan : Kepada

- Yth. 1. Bupati Bogor (sebagai laporan).
 2. Warek I BAK - UNHAN



LAMPIRAN 2
DATA INFORMAN

| No | Nama Informan | Jabatan/ Pekerjaan | Kode |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Adang Suptandar | Setda Kab. Bogor | I1 |
| 2 | Arif | Bappeda Kab. Bogor/ Kepala Sie Sarana dan Prasarana | I2 |
| 3 | Doni | Dinas PUPR/ Kepala Sei Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wil II | I3 |
| 4 | Dedi | Dinas LHK/ Ka. Sie Pengaduan | I4 |
| 5 | Hendi | Dinas Kesehatan Kab. Bogor/ P2PLK | I5 |
| 6 | Bisma | Dinas Perhubungan/ Ka. Bid. Daslop Kab. Bogor | I6 |
| 7 | H. Suharto Surah | Kesbangpol/ DPA | I7 |
| 8 | Theo Hidayat | FKDM Kab. Bogor | I8 |
| 9 | Icang Aliudin | Sekretaris Camat Parung Panjang | I9 |
| 10 | Nurrahim | Kapolsek Parung Panjang | I10 |
| 11 | Hj. Nina Hasyim | Lurah Parung Panjang | I11 |
| 12 | Wawan Suwanto | Humas Puskesmas Parung Panjang | I12 |
| 13 | Aziz | AGJT/ Humas | I13 |
| 14 | Pandji Ksatriadji | Mantan Camat Rumpin | I14 |
| 15 | Jajat | Perwakilan Supir | I15 |
| 16 | Gun Gun | Perwakilan KKT | I16 |
| 17 | Pandi | Warga Cigudeg | I17 |
| 18 | Ochan | Masyarakat/ Satpam | I18 |
| 19 | Ujang | BPD Desa Gerowong | I19 |

LAMPIRAN 3 CATATAN HASIL WAWANCARA

Identitas Informan.

Nama : Jajat
 Umur : 42 Tahun
 Pekerjaan : Sopir Transporter
 Alamat : Desa Cigudeg

Hasil Wawancara

Perkembangan pengangkutan barang tambang di wilayah jalur pertambangan Parung Panjang?

- Perkembangan transporter di wilayah tambang selalu bertambah tiap tahunnya, hal ini dikarenakan kebutuhan pemerintah dan perusahaan developer semakin meningkat akan kebutuhan bahan material bangunan seperti pasir dan batuan andesit. Dulu pada waktu masih tahun 2000an, jumlah truk tronton dan transporter masih bisa dihitung. Akan tetapi saat ini jumlah truknya sudah kurang lebih hampir 4000an truk tiap harinya yang keluar masuk di wilayah sini. Dulu ketika saya awal-awal sebagai supir transporter bisa masih melakukan pengangkutan 1-2x sehari, namun sekarang sekali pengangkutan kita harus menunggu 1 hari 1 malam. Uang jalan kita habis untuk makan dan bermalam ditempat tunggu, habis ditol dan BBM.

Sebagai gambaran, sekali jalan kita dikasih uang jalan hanya 1,2 juta, untuk kebutuhan BBM min 500rb, untuk uang tol min 150rb, untuk uang palak 150rb, belum lagi ditambah makan dipangkalan. Jadi bisa dikatakan saat ini kami sebagai supir transporter itu pendapatan sudah sangat berkurang dibandingkan dengan yang dulu. Untuk menambah pemasukan biaya tersebut terpaksa melebihi barang muatan ketika di Depo pengisian, dan menjualnya dipinggir-pinggir jalan tempat langganan ataupun pangkalan. Penjualan kelebihan muatan (Berakan) tersebut biasanya dihargai 200ribu, itu lah kenapa yang menjadi alasan untuk melebihi muatan. Uang tambahan itupun bukan cuman buat kita semua namun kita kasih ke petugas pengisian (Bego) 75rb agar dia mau mengusi truk dan ketika pengisian truk agar tidak terlalu dirusak. Karena ketika tidak dikasih uang tambahan mereka biasanya pengisiannya seenaknya saja, dan itu bisa merusak truk.

Potensi konflik di wilayah jalur pertambangan Parung Panjang?

- Untuk bentrok sering terjadi antara masyarakat dan transporter, hal ini mungkin disebabkan karena seringnya kerusakan jalan yang terjadi di wilayah ini. Kami pun tidak memungkiri bahwa kerusakan jalan yang terjadi di wilayah ini disebabkan banyaknya truk tronton yang melewati wilayah ini. Bentrok sering terjadi ketika musim hujan, dimana jalan rusak berlobang dan becek dimana-dimana, sehingga tidak bisa dilewatkan oleh

kendaraan kecil. Sebenarnya kami pun tidak tega melihatnya namun disatu sisi kami hanya menjalankan tugas dari boss untuk melakukan pengantaran barang ke tempat tujuan.

Situasi memanas antara masyarakat dan transporter itu ketika terjadi kecelakaan atau Laka Lantas dan memakan korban jiwa dari masyarakat. Berawal dari situasi tersebut biasanya bentrok kembali muncul, setelah itu situasi normal kembali, selalu seperti itu alur yang terjadi antara masyarakat dan transporter. Biasanya setelah kejadian tersebut masyarakat melakukan pemblokiran jalan dan tidak memperbolehkan truk lewat atau jalan. Ketika jalan ditutup muncul masalah baru yaitu kemacetan yang ditimbulkan karena truk berjejer hampir kurang lebih 10km dan ini mematikan seluruh aktifitas masyarakat yang ada di wilayah ini. Bayangkan saja ketika di palang dan ditutup orang mau berangkat ke tempat kerja, ke pasar, ke sekolah bakal terhenti dan tak bisa jalan juga sehingga aktifitas pembangunan pun terhenti, kemudian orang-orang yang bekerja ditambang pun tidak bisa memenuhi kehidupannya.

Masalah lain yang dimunculkan dari pemblokiran ataupun penutupan jalur parung panjang ini adalah berhentinya seluruh aktifitas pengiriman barang tambang ke Jakarta. Bahan material yang dihasilkan di wilayah Gunung Sindur, Rumpin, dan Parung Panjang 90% untuk mendukung pembangunan proyek di Jakarta baik yang dikembangkan oleh pemerintah ataupun swasta. Pembangunan infrastruktur yang diinginkan akan terlambat penyelesaiannya ketika jalur sini ditutup apalagi tambang-tambang yang ada disini ditutup pula.

Harapan dari transporter untuk mengantisipasi Potensi konflik di wilayah jalur pertambangan Parung Panjang?

- Pemerintah diharapkan mampu turun tangan dan membuat regulasi yang jelas terkait ijin jalan dan batas muatan. Sehingga semua perusahaan dan jasa transporter mau mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian pemerintah membuat batasan jumlah truk yang diperbolehkan melintasi wilayah ini, sehingga jalan yang ada disini tidak penuh oleh truk tronton saja. Ketika ini dibuat dan diterapkan maka akan meminimalisir kerusakan jalan yang ditimbulkan oleh angkutan barang tambang. Ditambah lagi ketika truk dibatasi barang angkut juga semakin lancar dan cepat, sebelumnya dari proses antri sampai pengantaran memerlukan waktu 1 hari 1 malam bisa lebih cepat dengan 1 hari, atau 1 hari 2x. Dengan begitu kerusakan jalan juga bisa diminimalisir dan perekonomian masyarakat juga masih tetap jalan dan tidak menutup mata pencaharian dari warga.

Identitas Informan.

Nama : Nurrahim
 Pangkat/ Korps : Kompol
 Satuan : Kepolisian
 Jabatan : Kapolsek Parung Panjang
 Alamat : Dramaga, Kota Bogor

Hasil Wawancara

Potensi konflik di wilayah jalur pertambangan Parung Panjang?

- Polisi sifatnya hanya memfasilitasi antara masyarakat dan para tokoh yang berkepentingan untuk melakukan komunikasi semisal, muspika, perwakilan tambang, transporter dll. Polsek Parung Panjang disini sifatnya hanya mengamankan, jangan sampai ada yg demo berujung rusuh, bentrok antar masyarakat. Jadi polsek disini tidak memiliki hak untuk melakukan pengamanan/ penindakan terhadap pelanggaran kelebihan muatan yang dilakukan oleh para transporter. Kami hanya melakukan penindakan terkait pelanggaran-pelanggaran administrasi, contohnya; kelengkapan surat-surat jalan, SIM, dan STNK. Sebenarnya pihak kepolisian ingin melakukan penindakan terhadap pengemudi-pengemudi dibawah umur, akan tetapi Disisi lain, kita tidak bisa melakukan penindakan/ penilangan tersebut dikarenakan pihak yang berwenang melakukan penindakan sebenarnya adalah ranah dari Dinas Perhubungan.
- Terkait jam operasional itu sudah berlangsung sejak 2010 sampai sekarang itupun sebagai tuntutan dari masyarakat mulai pukul 06.00-09.00 kemudian untuk sore mulia pukul 16.00-19.00. Ketika jam operasional berlangsung kita ikut mengamankan dan menutup jalan yang sudah di Portal yang disebelah utara di dekat jembatan Parung Panjang, dan diwilayah selatan didekat desa Growong. Pihak kami ikut menjaga agar tidak ada transporter yang menerobos palang pintu ketika jam operasional berlangsung. Pada tanggal 23 September 2018 telah terjadi kesepakatan baru terkait jam operasional berkendara, yang telah disetujui oleh pihak Quarry (pengusaha Tambang), Transporter dan masyarakat yang diketahui dan disahkan oleh Camat, Kapolsek dan Danramil Parung Panjang, bahwa jam operasional berlangsung mulai pukul 06.00-10.00 dan 16.00-20.00. sedangkan pada hari minggu jam operasional berlangsung dari 06.00-14.00 dan 16.00-20.00.
- Untuk konflik parung panjang sendiri relative tidak ada, hanya demo-demo kecil itupun hanya himbuan dan saran yang diberikan oleh masyarakat kepada camat untuk melaksanakan pelarangan-pelarangan jalan. Kita pun tidak berhak untuk melakukan penindakan karena kemabali lagi bukan hak kami. Karena sebenarnya parung panjang sendiri pun tidak ada lahan tambangnya, cuman banyak oknum-oknum yang bermain didalam perkembangan isu-isu tersebut, yang dikarenakan mereka tidak mendapat bagian. Kami pun tidak bisa mengikuti apa kemauan masyarakat untuk melakukan penutupan jalan, karena itu bukan kewenangan kami, jika ingin dilakukan penutupan jalan, kenapa pemerintah tidak melakuakan penutupan bahwa jalan ini tidak diperbolehkan untuk dilewati truck tronton. Masalah lain ketika kita

melakukan penutupan jalan ataupun masyarakat yang melakukan penutupan jalan otomatis kita akan menutup mata pencaharian masyarakat daerah gunung yang notabnya mereka mayoritas hidup bergantung pada hasil tambang. Tidak menutup kemungkinan ketika mata pencaharian mereka ditutup maka tindakan apapun akan mereka tempuh.

- Selama ini penutupan jalan sudah pernah terjadi semisal pada musim hujan jalanan rusak dan banyak lubang-lubang yang bisa mengakibatkan kecelakaan, tetapi jalan itu masih dilewatkan oleh tronton, sehingga jalanan makin tambah rusak, sehingga masyarakat tidak bisa lewat. Hingga akhirnya mereka menutup jalur dengan bamboo yg terlintang ditengah jalan dan batu-batu besar. Kejadian tersebut sempat hampir menimbulkan bentrok, namun segera bisa diredam dengan mempertemukan para pihak-pihak yaitu; Transporter, Quarry, Masyarakat, dan Muspika. Sehingga muncul kesepakatan bahwa pihak Quarry mau memperbaiki lubang-lubang yang ada di jalan dengan menutupnya dengan batuan split.
- Selama ini kita tidak melakukan pembiaran terhadap transporter yg mengangkut melebihi kapasitas. Bukannya kita melakukan pembiaran akan tetapi itu memang bukan ranah kami untuk menjalankan itu, itu sebenarnya memang harus kewenangan Dinas Perhubungan, kenapa mereka melakukan pembiaran, dan kerusakan jalan itu harus PU membatasi. Jika kita melakukan tindakan dikira nanti kita melangkahi wewenang dari mereka. Kita pun tidak bisa menindak pihak-pihak yang membuka lahan, karena memang perijinan tambang pun bukan keluar dari kami sehingga kami tidak bisa melakukan penindakan terhadap penambangan. Jika penambangan itu illegal kita bisa melakukan penindakan itupun melalui prosedur yang jelas dan kerjasama dengan dinas terkait apakah memang itu legal atau legal.
- Sebenarnya konflik yang terjadi disini itu hanya permasalahan jalan yang rusak, berdebu, dan berlubang. Ditambah lagi banyaknya pendatang baru yang menempati wilayah sini, semisal perumahan Sentraland, dan Green Village. Mereka ini rata2 pendatang yang tidak tahu sejarah wilayah jalur tambang ini yang memang dari dulu dilewatkan oleh truck tronton. Bagi masyarakat pinggir jalan mereka membuka warung, jual makanan, jual bensin dan sebagainya. Apabila jalur ini ditutup mereka berpenghasilan dari mana. Ini seharusnya juga menjadi permasalahan serius dari pemerintah. Bagaimana mengatasinya, kepolisian posisinya disini hanya mengamankan dan mengawal kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah, baik daerah maupun pusat.

Identitas Informan.

Nama : Ujang
 Umur : 35 Tahun
 Pekerjaan : Pedagang/ BPD Desa Gerowong
 Alamat : Desa Gerowong Parung Panjang

Hasil Wawancara

Perkembangan pengangkutan barang tambang di wilayah jalur pertambangan Parung Panjang?

- Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa jalan yang selalu dilewat ini sudah sangat parah kondisinya. Truk lalu lalang selama 24jam non-stop kecuali ada pembangunan jalan. Kami dari perangkat desa yang yang dilewat tidak bisa berbuat apa-apa karena jalan yang dilalui kapasitasnya sudah jalan provinsi bukan jalan desa lagi. Kondisi rumah-rumah dispeanjang jalan yang dilwaatin truk semua berdebu dan kotor, tiap 5 menit sekali menyapu teras rumah. Belum lagi debu-debu yang mengakibatkan sakit pernapasan dan berdampak pada ISPA. Saat ini dari desa hanya bisa melaporkan dan memberikan data ke Kecamatan kemudian kecamatan diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi, Kabu-aten atupun Provinsi. Gerowong ini bisa dikatakan sebagai desa dengan titik kerusakan terparah jalannya. Biasanya parah supir ini pada berhenti dan menunggu giliran untuk masuk ke tambang depo pengisian, ataupun keluar dari depo pengisian mereka disini. Disamping itu para supir juga menjual berakan (kelebihan muatan) disini. Jadi kenapa disini bisa dikatakan titik terparah karena sebagian besar truk truk besar itu pada parkir ditempat ini.

Meskipun memiliki kerusakna yang sangat parah, akan tetapi hal tersbut membuat masyarakat hidup lebih makmur, karena perekonomian diwilayahnya terus berputar. Banyak warga berjualan makanan, menjual rokok atau minuman, serta tempat jual pasir atau batuan andesit pun bisa dilakukan disini. Masyarakat disini apabila tidak ada aktifitas tambang mereka penghidupannya kurang. Maka dari itu mereka diam saja meskipun adanya transportasi tambang ini pula yang mampu menghidupi mereka. Perekonomian masyarakat disini bisa dilihat ketika menjelang H-7 lebaran hingga H+7 lebaran, perekonomian masyrakat seolah lumpuh dan mengalami penurunan yang sangat signifikan oleh masyarakat. Tidak dipungkiri bahwa dengan adanya jalur tambang disini membuat masyarakat perekonomian kehidupannya sedikit terangkat, meskipun bahaya kesehatan dan ancaman kecelakaan pula meningkat. Orang-orang

disini pun tidak mau jika tambang diwilayah ini ditutup, begitupun mereka tidak setuju apabila ada jalur khusus tambang, disamping jalur berubah, pendapatan masyarakat yang bergantung pada jualan disekitar jalur juga akan mengalami penurunan pendapatan.

- Desa dan perangkatnya selama ini hanya memberikan surat pengantar ketika ada warga yang ingin memanfaatkan lahannya untuk digunakan sebagai bahan batu bata. Kami pun tahu ketika ada warga yang menggunakan lahan mereka untuk jual beli tanah. Namun kami tidak bisa berbuat banyak karena untuk tindak lanjutnya yang memberikan adalah kecamatan. Dilaporkan untuk ijin ke dinas terkait atau tidaknya itu bergantung dari individunya masing-masing.
- Kalo diwilayah ini terjadi bentrok atau perkelahian terkait pemblokiran jalan ataupun masalah penutupan lahan, pasti akan menjadi konflik nasional. Wilayah sini ada pemasok utama bahan bangunan untuk Ibukota, kemudian banyak orang yang bergantung hidupnya dari pertambangan yang ada diwilayahnya. Untuk itu mereka akan melindungi tempat2 untuk mereka mencari nafkah. Permasalahan diwilayah sini itu adalah maraknya premanisme, jadi truk-truk yang lewat disitu mereka pasti sudah memiliki backing masing-masing. Jadi ketika ada masalah dengan pihak lain mereka yang akan menyelesaikannya.
- Bentrok antara masyarakat dan warga sering terjadi. Biasanya diakibatkan oleh adanya kecelakaan yang hingga memakan korban. Dari kearahana masyarakat muncullah aksi pemblokiran jalan. Sehingga meningkatkan eskali potensi konflik yang bisa berakibat keributan. Pernah terjadi antara masyarakat dan transporter ketika ada pemblokiran jalan, para sopir bersikeras untuk mencabutnya dan kemudian warga marah sehingga terjadi bentrok yang sifatnya meluas.

Identitas Informan.

Nama : Candra
 Umur : 35 Tahun
 Jabatan : Ketua MP3 (Masyarakat Peduli Parung Panjang)
 Alamat : Perum Parung Panjang

Hasil Wawancara

Potensi konflik di wilayah jalur tambang Parung Panjang?

- Selama ini jalur parung panjang yang dilewat oleh truk angkutan tambang dianggap sangat meresahkan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan oleh angkutan tambang ini adalah kerusakan jalan, kemacetan, debu, kesehatan, dan kecelakaan yang mengakibatkan korban tewas. Keresahan masyarakat ini sudah berlangsung sejak lama, sempat terjadi bentrok kecil antara masyarakat parung panjang dan sopir transporter ketika dilakukan pemblokiran jalan oleh masyarakat. Masyarakat terpaksa melakukan pemblokiran jalan, karena waktu itu jalan yang dilewat oleh truk sudah tidak bisa untuk dilewat namun para supir masih memaksakan untuk terus lewat sehingga kerusakan jalan bertambah parah.

Disaat jalur ini ditutup oleh warga dengan Ban bekas, Bambu dan Batu besar, terjadi kemacetan yang sangat panjang. Kemacetan ini di perkirakan lebih dari 10km. Langkah ini diambil karena tidak ada kesadaran dari sopir dan juga pemilik tambang untuk memperbaiki jalur yang dilewat. Pemblokiran ini terjadi kurang lebih 1 hari 1 malam, sehingga keesokan harinya para sopir mencoba membuka blokir dan dihalangi oleh masyarakat sehingga hampir terjadi pukul-pukulan antara masyarakat dan sopir transporter. Namun, kejadian tersebut cepat di leraikan oleh kepolisian dan TNI yang cepat mencegah keributan tersebut meluas. Sehingga selanjutnya kejadian tersebut langsung diambil alih oleh muspika parung panjang yang mempertemukan camat, kapolsek, Danramil, perwakilan tambang, dan perwakilan dari masyarakat. Kemudian dari pertemuan tersebut mendapat kesepakatan untuk membuka jalur tersebut dan memperbaiki jalur tersebut dan melakukan penyiraman tiap harinya.

Namun kesepakatan tersebut hanya berlangsung 3 bulan, sehingga bulan selanjutnya jalan yang dilewat sudah tidak ada perbaikan dari tambang, jalur tersebut kembali rusak parah dan berdebu. Kemudian dari Aliansi Gerakan Jalur Tambang mengambil langkah untuk melakukan tindakan pengaduan ke Pemda. Kegiatan ini sempat dilakukan 2x yang pertama 5 juli 2018 dilakukan demo di tingkat kecamatan. Demo ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban atas tuntutan yang diminta oleh masyarakat terkait pembangunan Jalur Khusus Tambang, perbaikan jalur yang selama ini dilewat oleh truk tambang, dan penutupan tambang ilegal yang masih beroperasi. Setelah dirasa tidak mendapatkan jawaban atas tuntutan tersebut, AGJT mengumpulkan massa lebih banyak untuk melakukan demo ke kantor Bupati Bogor, untuk menyuarkan tuntutan masyarakat yang merasa didzolimi oleh

pemerintah atas perijinan tambang-tambang yang diberikan oleh pemerintah.

Demo yang telah dilaksanakan itu tidak kunjung mendapatkan jawaban dari pemerintah atas apa tuntutan mereka itu. Pemda seolah-olah tutup mata karena tambang yang ada diwilayah tersebut bukanlah tanggung jawab Pemda melainkan tanggung jawab dari Pemerintah Provinsi. Hal ini lah yang memicu kemarahan masyarakat dengan pemilik tambang serta pemerintah karena mereka beranggapan bahwa wilayahnya telah dirusak namun tidak ada dispensasi dari pemerintah ataupun niat baik pemerintah untuk mencari win-win solution untuk mereka. Hal seperti ini mungkin yang akan menjadikan ancaman potensi konflik dimasa yang akan datang. Pemerintah seolah melakukan pembiaran atas apa yang terjadi disepanjang jalur parung panjang yang dibuat jalur tambang.

- Selama ini dari pihak AGJT telah mengupayakan berbagai hal untuk mencapai win win solution atas apa yang terjadi antara masyarakat dan pengusaha tambang termasuk transporter ataupun dengan masyarakat. Aliansi gerakan telah melakukan demo di kecamatan, dan kantor bupati, serta telah melakukan audiensi dengan anggota DPR dapil parung panjang dan juga Gubernur baru Jawa Barat, Ridwan Kamil. Dari segala aktifitas yg pernah dilakukan tersebut belum mendapatkan hasil sama sekali. Hanya janji yang diberikan oleh pemerintah terkait pembuatan jalur khusus tambang. Akan tetapi pemerintah sendiri juga belum tahu pasti jalur yang akan dibuat, dan kapan pastinya waktu akan dibangun. Pemerintah hanya membrikan janji untuk meredam aksi penolakan dari masyarakat terkait jalur skerang yang dilewatin. Saat ini kami dari perwakilan Aliansi Masyarakat Jalur Tambang berharap kepada pemerintahan baru kang Emil untuk mengambil alih daerah ini. Niat baik kang Emil sudah ditunjukkan secara langsung dengan mengunjungi wilayah jalur Tambang parung panjang dan sekitarnya pada tanggal 28 September 2018. Kang emil berjanji untuk menindak tegas pengusaha2 nakal dan juga supir2 nakal yang selama ini menjadi akar permasalahan diwilayah tersebut.
- Pemerintah diharapkan mampu membuat regulasi yang jelas terkait perijinan tambang sekaligus membatasi pembukaan lahan baru, karena dampak yang diakibatkan pembukaan lahan baru ini sangat terasa. Kemudian pemerintah membuat batasan jumlah truk yang diperbolehkan melintasi wilayah ini, sehingga jalan yang ada disini tidak penuh oleh truk tronton saja. Ketika ini dibuat dan diterapkan maka akan meminimalisir kerusakan jalan yang ditimbulkan oleh angkutan barang tambang. Pemerintah membuatkan jalur khusus tambang, dengan adanya jalur tersebut diharapkan akan mampu mengurangi volume kendaraan truk yang lewat diwilayah jalur tambang sehingga mengurangi debu, sehingga memperbaiki kesehatan masyarakat dan memperkecil terjangkitnya ISPA.

Identitas Informan.

Nama : Dedi
 Satuan : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bogor
 Jabatan : Sie. Bidang Pelaporan/ Pengaduan
 Alamat : Depok

Hasil Wawancara

Potensi konflik di wilayah jalur pertambangan Parung Panjang?

- Untuk konflik di wilayah parung panjang sendiri sebenarnya tidak ada demo, hanya saja ada pelaporan yang bersifat demo-demo kecil itupun hanya himbauan dan saran yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk menindak pelanggaran-pelanggaran jalan serta memindahkan jalur pertambangan yang dilewatin. Kita pun tidak berhak untuk melakukan penindakan atau penghentian terhadap tambang yang saat ini sedang berjalan, kami tidak diperbolehkan untuk melakukan itu, bukan hak kami. Fungsi kami sebenarnya hanya pengawasan dan memberikan pelaporan/ rekomendasi kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi, disetujui atau tidaknya kembali dari putusan. Sebenarnya parung panjang sendiri pun tidak ada lahan tambangnya, mereka hanya menerima dampak yang diakibatkan oleh truk yang lalu lalang selama 24 jam nonstop.
- Kami pun tidak bisa mengikuti apa kemauan masyarakat untuk melakukan penutupan terhadap tambang-tambang yang ada, karena perijinan dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi. Terkadang perijinan tersebut dikeluarkan oleh Provinsi tanpa ada pemberitahuan kepada Pemkab bahwa mereka telah menerbitkan ijin kepada beberapa perusahaan. ketika itu dilakukan bisa dilakukan pengecekan lapangan dan memberika batasan2 yang boleh dan tidak dilakukan. Sementara itu jalan yg sering dilewatin truk sudah semakain parah dan tidak bisa dilawatin oleh kendaraan kecil (Motor, Sepeda, dan mobil2 kecil.
- Selama ini yang menjadi faktor utama dari tuntutan masyarakat adalah perbaikan jalan. Jalan di wilayah parung panjang ini sering mengalami kerusakan, dampak dari kerusakan itulah yang mengakibatkan debu, lubang, dan sebgaiannya sehingga aktifitas masyarakat juga terganggu. Masyarakat juga menyayangkan kenapa di wilayah ini yang notabnya wilayah khusus namun perlakuannya sama dengan daerah yang bukan dilewati truk muatan tambang. Hal ini lah yang menjadi kesalahan fatal dari pemerintah, belum bisa memberikan fasilitas yang diperlukan oleh suatu daerah. Maka masyarakat selalu teriak-teriak kepada pemerintah terkait jalan itu sendiri.

Sedangkan disisi lain, ruas jalan perbatasan dari Parung Panjang yang sudah menjadi wilayah Tangerang Selatan, yakni di wilayah kecamatan Karang Tengah kondisi jalan masih sangat bagus. Padahal

jika dibandingkan dengan wilayah Parung panjang dengan intensitas truk yang sama, kuantitas tonase truk yang sama dan dilewati truk sama. Hal ini lah yang menjadikan masyarakat tambah teriak. Seharusnya melihat permasalahan yang ada dilalapanga pemerintah harus melakukan peninjauan dan pengkajian ulang terkait toanse jalan yang di wilayah tersebut. Apabila terjadi kecurangan didalam pemabnaguna jalan tersebut dinas terkait bisa mengambil tindakan terhadap kontraktor proyek.

- Langkah yang paling tepat untuk dilakuakn pemerintah saat ini adalah perbaikan jalan, dengan dilakuakannya perbaikan jalan tersebut maka akan mengurangi banyak dampak seperti debu dan kesehatan, serta yang paling penting adalah untuk menurunkan eskalasi konflik antara masyarakat dan sopir transporter. Kebutuhan utama saat ini yang diharapkan oelh warga adalah jalan yang bisa dilewatin setiap saat tanpa adanya bahaya kecelakaan. Seperti laporan para warga disana bahwa sering terjadi kecelakaan yang dikaibatkan jalan rusak. Diantaranya tabrakan, truk guling, rem blong, dll, dan menimbulkan korban jiwa. Meskipun nanti dilapangan ketika jalan tersebut setelah dibangun sopir truk tambah ugal-ugalan karena jalanan sudah bagus, yang terpenting dari pemerintah membuatkan fasilitas tersebut, karena itu menjadi permasalahan yang krusial.

Disisi lain pemerintah juga harus selalu tetap mengusahakan pambangunan Jalur khusus tambang untuk mengurai kepadatan jalur yang dilewati oleh Transporter. Ketika sudah ada ada jalur khusus tambang maka para sopir ini pula bisa meminimalisir jarak waktu tempuh dan menghindari jam operasional yang ada di wilyah parung panjang. Terkait regulasi dan perencanaannya pemerintah bisa berkoordinasi dinas terkait dan pemerintah pusat, serta harus ada keterlibatan dari pemilik tambang. Untuk membahas siapa yang lebih berwenang dan bagaimana pembiayaannya.

LAMPIRAN 4 DOKUMEN PENDUKUNG

BERITA ACARA KESEPAKATAN

Pada hari **Minggu** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **September** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, bertempat di Aula Kantor Kecamatan Parungpanjang. Telah dilaksanakan musyawarah yang dihadiri oleh Muspika Kecamatan Parungpanjang, Polres Bogor, Kepala Desa, MP3 Perwakilan Masyarakat, Transporter dan Quarry (Pengusaha Galian Batu Cigudeg).

Dari musyawarah, dapat disimpulkan dan menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

1. Diberlakukan **Jam Operasional** Truk Tronton **dilarang** melintas dari jam 06.00 s/d 10.00 WIB dan jam 16.00 s/d 20.00 WIB.
2. Pada hari **Minggu** diberlakukan **Jam Operasional** Truk Tronton **dilarang** melintas dari jam 06.00 s/d 14.00 WIB dan jam 16.00 s/d 20.00 WIB.
3. Untuk kesepakatan yang terkait aturan berkendara yang sudah dituangkan di perjanjian sebelumnya tetap diberlakukan seperti biasa.
Demikian berita acar ini kami buat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Yang membuat kesepakatan :

1. Aris Munandar (MP3/Perwakilan Masyarakat)
2. Fadlan (Asosiasi Transporter)
3. Syahrul Hwan (Perwakilan Pengusaha Quarry)
Gun gun



Mengetahui,
Perwakilan Kepala Desa

KEPALA DESA PARUNGPANJANG

Hj. NINA KURNIASIH

KEPALA DESA LUMPANG

M. RODIS FAISAL

MUSPIKA KECAMATAN PARUNGPANJANG

Pib. CAMAT PARUNGPANJANG

ICANG ALJUDIN, S.Pd.,MM.
NIP. 196910291990031001

KAPOLSEK PARUNGPANJANG

NURAHIM
Koptol. NRP. 64080671

DANRAMIL PARUNGPANJANG

AGUS PURNAMA YUSUF
Kapten INF. NRP. 628765

LAMPIRAN 5 DOKUMENTASI PENELITIAN



